

Judul : Menkeu Tegaskan Tak Ada Perubahan Kebijakan Energi
Tanggal : Sabtu, 07 September 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 5

Menkeu Tegaskan tak Ada Perubahan Kebijakan Energi

● ADINDA PRYANKA,
MUHAMMAD NURSYAMSYI

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dalam kesepakatan itu, terdapat penurunan anggaran subsidi energi hingga Rp 12 triliun dibandingkan rancangan dalam nota keuangan RAPBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemangkasan tersebut bukan karena adanya perubahan dari sisi kebijakan, melainkan perubahan asumsi makro. Dia menjelaskan, asumsi makro untuk harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) yang disepakati adalah 63 dolar AS per barel. "Angka itu turun dari 65 dolar AS per barel dalam RAPBN 2020," ujar Sri ketika ditemui se usai rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9).

Penurunan asumsi makro tersebut menyebabkan terjadi perubahan perhitungan pada subsidi energi. Sri memastikan, tidak ada pengurangan besaran volume subsidi yang diberikan kepada masyarakat.

Sri menjelaskan, ICP merupakan poin penting dalam menghitung subsidi energi. Sebab, ICP menjadi biaya produksi untuk aktivitas PLN maupun Pertamina. "Jadi, salah kalau (perubahan subsidi energi) karena penurunan. Ini perubahan karena implikasi (perubahan asumsi makro dasar)," tuturnya.

Sri juga menyebutkan, perubahan harga ICP pada asumsi dasar ekonomi makro dan parameter migas pada 2020 itu bukan hanya keputusan Kemenkeu. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR yang salah satunya bertanggung jawab atas bidang energi.

Rapat Kerja Banggar DPR menyetujui postur sementara APBN 2020. Dalam postur itu, subsidi energi ditetapkan menjadi Rp 125,3 triliun, turun dari rancangan sebelumnya, yakni Rp 137,5 triliun. Perinciannya, subsidi BBM dan LPG turun dari Rp 75,3 triliun menjadi Rp 70,6 triliun, sementara subsidi listrik turun dari Rp 62,2 triliun menjadi Rp 54,8 triliun.

Selain itu, Pemerintah dan Banggar juga menyepakati postur sementara APBN 2020 untuk pos pendapatan negara sebesar Rp 2.233,2 triliun. Angka itu naik Rp 11,6 triliun dari rancangan sebelumnya sebesar Rp 2.221,5 triliun.

Sri menyebutkan, ada dua faktor besar yang memengaruhinya. Pertama, penerimaan perpajakan naik Rp 3,9 triliun dari semula Rp 1.861,8 triliun menjadi Rp 1.865,7 triliun. Apabila diperinci, kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan Pajak Penghasilan Migas (PPH) migas Rp 2,4 triliun. "Ini dikarenakan penurunan ICP, kenaikan *lifting* migas, dan penurunan *cost recovery*," ujarnya.

Di sisi lain, postur belanja juga mengalami kenaikan dari usulan awal, yakni Rp 2.528,8 triliun menjadi Rp 2.540,4 triliun. Meski subsidi energi turun hingga Rp 12 triliun akibat penurunan ICP, pemerintah menyesuaikan anggaran pendidikan, dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 8,2 triliun. Tujuannya, mempertahankan 20 persen dari belanja negara.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Abumanan mengatakan, subsidi untuk seluruh pelanggan 900 VA akan dicabut. Hal itu, ujarnya, telah menjadi keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah.

"Maka, akan ada *tariff adjustment*. Kelompok ini yang tadinya disubsidi jadi pindah kelompok ke yang tidak disubsidi," kata Djoko.

■ ed: ahmad fikri noor